



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **75.95** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	27.75
b. Pengukuran Kinerja	30	20.5
c. Pelaporan Kinerja	15	8.7
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>75.95</b>
<b>Predikat AKIP</b>		<b>BB</b>

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

1. Indikator dan Target kurang SMART
2. Masih ada Renaksi yang belum punya target

### 2.) Pengukuran Kinerja

1. Belum ada informasi yang menyatakan perbaikan kinerja sebagai tindaklanjut hasil pengukuran kinerja

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. Analisa faktor-faktor pendukung keberhasilan/kegagalan belum mendalam dan komprehensif

2. Laporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya,

#### 4.) Evaluasi Internal

1. Dokumen Rencana Aksi TL tidak di upload seluruhnya
2. Tidak di upload DPA tahun 2023 dan DPA tahun 2024, terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran

### **3. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Agar indikator target lebih SMART
2. Lengkapi setiap RENAksi dengan target

#### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Lengkapi dengan informasi yang menyatakan perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kinerja

#### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar menganalisa faktor-faktor keberhasilan/kegagalan secara mendalam dan komprehensif
2. Agar Laporan Kinerja dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kinerja, aktivitas dan strategi yang akan dilaksanakan tahun berikutnya

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Untuk di upload seluruh file Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE
2. Untuk mengupload DPA tahun 2023 dan DPA tahun 2024, terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang

lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka